

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



RENCANA KERJA

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI TAHUN 2021



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI
NOMOR : KEP/ /VI/2020 TANGGAL JUNI 2020



KEPUTUSAN

Nomor : Kep/ 18 /VI/2020

tentang

**RENCANA KERJA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A 2020, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4158);

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);

8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/572/XI/2009 tanggal 2 November tahun 2009 tentang draft akhir panduan Penyusunan Rencana Kerja lingkungan Polri;

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

10. Peraturan

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek);
11. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1132/VI/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/260/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : KEP/247/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021;
 2. Pagu Indikatif Satker Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU T.A. 2021
1. Rencana Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2021, agar dipedomani dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas bagi Satker dan Sub Satker Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batam
 pada tanggal : 30 Juni 2020



Tembusan :

1. Kapolda Kepri.
2. Wakapolda Kepri.
3. Irwasda Polda Kepri.
4. Karorena Polda Kepri.

**RENCANA KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Memperhatikan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan susunan organisasi tata kerja Polri, maka Polda Kepulauan Riau memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu paradigma pembangunan Kepolisian yang professional, modern dan terpercaya, yang telah dicanangkan oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D, dilanjutkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si melalui penguatan Polri Promoter menuju Indonesia maju dengan prioritas pada; mewujudkan SDM yang unggul; penataan Kelembagaan; pemantapan harkamtibmas; penegakan hukum yang professional dan berkeadilan; manajemen media; penguatan sinergi polisional dan penguatan pengawasan, yang dalam implementasinya mengarah pada peningkatan aktualisasi Tupoksi dan peran Kepolisian dalam; (1) pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif; (2) peningkatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepolisian yang berkelanjutan; dan (3) Penegakan hukum yang berkeadilan.

Polda Kepulauan Riau merupakan bagian dari institusi Polri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Program Prioritas Kapolri, kebijakan strategis Polri yang terdapat pada Rencana Strategis Polri dan Rencana Startegis Polda Kepulauan Riau. Selain memperhatikan kebijakan strategis tersebut, Polda Kepulauan Riau juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis daerah, karakteristik wilayah serta arah dan kebijakan pembangunan Daerah provinsi Kepulauan Riau sehingga diperoleh formulasi yang tepat dan ideal dalam penyusunan sasaran prioritas, arah kebijakan dan strategi serta kebutuhan ideal Polda Kepulauan Riau pada Tahun 2021.

Pelaksanaan tugas Polda Keulauan Riau telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan dengan ditandai kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik serta adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh segenap personel Polda Kepri dan jajaran yang didukung oleh pihak-pihak terkait baik unsur Pemerintah, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Polda Kepri. Keberhasilan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan guna memenuhi

harapan.

harapan dan tuntutan masyarakat serta Pemerintah terhadap pelayanan Polda Kepri yang lebih baik.

Keberhasilan yang sudah diraih Polda Kepri diharapkan dapat membuat Polda Kepri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya tuntutan dan harapan masyarakat maupun Pemerintahan Daerah kepada Polda Kepri untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dalam memelihara situasi Kamtibmas agar tetap kondusif, terlaksananya penegakan hukum yang profesional serta meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian.

Tugas Polda Kepulauan Riau ke depan masih dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang sampai saat ini belum seluruhnya dapat di penuhi. Masyarakat menuntut dan mengharapkan agar Polri mampu mewujudkan: (1) Polri yang professional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara professional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Hakekat ancaman pada Tahun 2021 diperkirakan akan semakin kompleks, bila dihadapkan dengan perkembangan stabilitas keamanan yang perlu diantisipasi pasca Pemilukada 2020. Untuk mengantisipasi berbagai bentuk hakikat ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan khususnya di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau pada Tahun 2021, sesuai diamanatkan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka Kamdagri tentunya harus mampu mendeteksi, mengantisipasi dan menanggulangi setiap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban yang akan timbul pada Tahun 2021.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global, mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta penyebaran *Covid-19* dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional

masih.....

masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran virus corona (*Covid-19*), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham *radikalisme* serta *terorisme*. Dalam perkembangan lingkungan strategis nasional dapat dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah diantaranya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi, krisis ekonomi, ketenagakerjaan dan kerawanan penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Semua isu strategis baik global, regional, nasional dan lokal harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Kepulauan Riau yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek kehidupan

1) Global

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

- a) langkah pemerintah Amerika Serikat mengubah fokus ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan untuk pendorong dan penyeimbang berbagai konflik di Asia. Keterlibatan AS di Asia mendukung negara-negara sekutunya membuat konflik semakin panas. Pasukan AS di Asia membuat ketegangan meningkat;
- b) perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang semakin memanas sangat berpengaruh terhadap perekonomian global. Kenaikan tarif impor yang dilakukan baik oleh Amerika Serikat maupun China sebesar 25% dari sebelumnya sebesar 10% akan berimbas pada menurunnya impor kedua negara tersebut. Hal ini perlu diwaspadai karena akan berdampak juga pada kemungkinan menurunnya ekspor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat maupun China, mengingat kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia.
- c) rencana Amerika Serikat yang akan memfokuskan pengamanannya dari Timur Tengah ke Asia-Pasifik pada Tahun 2020 dengan menempatkan 60% kekuatan Angkatan Laut di wilayah Asia-Pasifik. Pengiriman jet-jet tempur AS ke beberapa negara di kawasan Samudera Pasifik, seperti Thailand, India, Singapura dan Australia untuk memperkuat kehadiran militer AS di Samudera Pasifik. Kondisi ini perlu diantisipasi karena

Indonesia berada diantara 2 (dua) kekuatan Amerika Serikat dan Cina;

- d) menghadapi ketatnya persaingan global telah terjadi perubahan besar pada pola-pola hubungan antarnegara di level internasional. Perubahan paling mencolok dari bermunculannya organisasi-organisasi kerjasama antarnegara, terutama ditingkat regional, yakni Uni Eropa (UE), ASEAN, PIF, NAFTA dan *The Mercosur-European Union Business Forum* (MEBF). Terlepas motif pendiriannya, kehadiran organisasi-organisasi ini memberi warna baru hubungan Internasional dimana dunia cenderung bergerak menuju suatu tatanan dunia baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional dan Internasional;
- e) Uni Eropa sebagai organisasi kawasan memiliki kekuatan ekonomi memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian global mengimbangi dominasi AS. Dengan demikian nilai strategis Uni Eropa bagi Asia Tenggara juga memperhatikan perkembangan Brexit dimana sampai dengan saat ini belum jelas kepastian Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa akibat rancangan perjanjian yang diajukan oleh Perdana Menteri Inggris sudah ketiga kalinya ditolak oleh Parlemen Inggris;
- f) fluktuasi harga minyak dunia terus mempengaruhi aktivitas perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh :
 - (1) situasi politik negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal;
 - (2) meningkatnya konsumsi BBM;
 - (3) penurunan cadangan minyak bumi;
 - (4) aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional.
- g) penambahan penduduk dunia telah mencapai 7,2 milyar jiwa lebih mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan. Di samping itu, perubahan iklim karena pemanasan global menimbulkan gangguan hasil panen dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian akan semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri seperti terjadi di RRC, India, Brasil, Vietnam dan Thailand yang saat ini menjadi produsen pangan dunia. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap terbatasnya ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia seperti Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana kelaparan;
- h) terjadinya perubahan iklim (*climate change*) sebagai akibat penggunaan bahan bakar fosil, industrialisasi dan alih fungsi lahan, telah menghasilkan efek pemanasan global (*global warming*) yang telah meningkatkan suhu permukaan bumi serta

munculnya berbagai ragam penyakit dan gangguan kesehatan manusia di seluruh dunia;

- i) situasi keamanan internasional masih terus diwarnai oleh isu konflik di Palestina, Irak dan Afghanistan. Disamping itu, pengaruh isu demokratisasi liberal akan semakin meluas dan memicu terjadinya konflik bersenjata di seluruh negara-negara kawasan Timur Tengah, yang ditengarai merupakan strategi AS dan sekutunya untuk menguasai ladang minyak dikawasan tersebut;
- j) konflik yang sering terjadi di kawasan Afrika merupakan pertarungan kepentingan dalam memperebutkan Sumber Daya Alam. Afrika yang kaya akan hasil tambang dan minyak bumi, seperti Sudan, Afrika Selatan dan Nigeria menjadi rebutan dari kekuatan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan kekuatan Rusia dan RRC. Perebutan sumber daya alam tersebut membuat Afrika menjadi kawasan tidak pernah lepas dari konflik dan kekerasan berujung kepada pertempuran bersenjata ataupun rivalitas antaretnis;
- k) munculnya *terorisme* sebagai musuh bersama dalam pola penanganannya cenderung telah berubah dari pola *pre-emptive strike* menjadi pola penanganan yang lebih mengedepankan cara-cara diplomatis dan persuasif.
- l) Pandemic virus *Covid-19* yang telah menyebar di hampir seluruh Negara di dunia dan menimbulkan korban sudah lebih dari 1 juta orang meninggal dunia.

2) Regional

a) Indonesia dengan Cina

Ketegangan hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara Cina terkait batas perairan di wilayah Natuna, laut Tiongkok. Hal ini terjadi ketika Pemerintah Indonesia menerbitkan peta baru kemaritiman di Kepulauan Natuna yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai pengakuan Indonesia Negara Kepulauan. *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menegaskan hak-hak Indonesia menentukan batas dan menamai wilayah lautnya. Penamaan laut Natuna Utara mempertegas kedaulatan laut mengingat posisi strategis wilayah penyalahgunaan pihak-pihak tertentu seperti maraknya penangkapan ikan secara illegal oleh perahu maupun kapal bendera asing.

b) Indonesia dengan Malaysia

- (1) Permasalahan batas wilayah di selat Malaka yaitu pada Tahun 1969 Malaysia mengumumkan bahwa lebar wilayah perairannya menjadi 12 mil laut diukur dari garis

dasar sesuai ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958. Namun sebelumnya Indonesia telah lebih dulu menetapkan batas-batas wilayahnya sejauh 12 mil laut dari garis dasar termasuk Selat Malaka. Hal ini menyebabkan perseteruan antara dua negara mengenai batas laut wilayah mereka di Selat Malaka yang kurang dari 24 mil laut.

(2) Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat menggunakan peta Belanda Van Doorn Tahun 1906. Malaysia pun tak mempermasalahkannya apabila mengacu kepada garis batas peta Belanda Van Doorn Tahun 1906, peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwind) dan peta *Federated Malay State Survey* Tahun 1935. Masalah baru timbul dalam MoU antara *team Border Comeete* Indonesia dengan pihak Malaysia. Garis batas itu dirubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas. Dan akibat kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.

c) Indonesia dengan Singapura

Permasalahan batas wilayah di sebelah Utara Pulau Karimun Besar dan Pulau Bintan merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulauanya menjadi daratan yang luas.

d) Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang termasuk dalam Segitiga Emas (*The Golden Triangle*) dan menjadi sorotan dunia, negara-negara kawasan Asia Tenggara mengancam peredaran Narkoba yang menjadi ancaman bangsa. Persoalan Kamboja dengan negara tetangga, seperti Thailand adalah tanda tapal batas sementara dengan Vietnam seputar kedaulatan sekitar lepas pantai;

e) adanya tindakan represif aparat keamanan Thailand terhadap warga muslim di wilayah penduduk Islam di Thailand Selatan, sehingga terjadinya aksi perlawanan kelompok-kelompok muslim di negara tersebut, yang mendapat dukungan kelompok-kelompok muslim di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Persoalan lain seputar perbatasan dengan Laos

meliputi beberapa pulau di Sungai Mekong, dan perbatasan dengan Kamboja;

- f) kelompok Al Jemaah Al Islamiyah berbasis di Malaysia telah membangun jaringan terorisme dengan kelompok garis keras/radikal di Indonesia. Kelompok ini cenderung menggunakan wilayah Indonesia sebagai daerah operasinya karena dianggap lebih memungkinkan dari sisi ideologi, ekonomi, sosial budaya dan sistem keamanannya. Berbagai aksi terorisme di Indonesia disinyalir melibatkan kelompok tersebut.

3) Nasional

Lingkungan strategis Nasional dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis Nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, isu-isu strategis tersebut sebagai berikut:

- a) wilayah Indonesia yang sangat luas dan berbatasan langsung maupun tidak langsung (darat dan perairan laut) dengan negara tetangga, sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnasional, termasuk pencurian ikan di perairan wilayah Indonesia;
- b) Indonesia salah satu negara memiliki jumlah penduduk sangat besar yaitu 257.912.349 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,2 %, sehingga penambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terjadinya berbagai masalah konflik sosial antar warga maupun masyarakat;
- c) Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga penambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal maupun horizontal;
- d) sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat istiadat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e) negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam sangat berlimpah tidak hanya berupa bahan tambang, tetapi juga hutan, air, tanah yang subur dan laut yang luas. Hal di atas menjadi aspek yang diperebutkan oleh negara yang terbatas atau tidak memiliki sumber daya alam untuk mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia. Hal tersebut jika tidak terkendali ke depan justru akan menjadi permasalahan untuk generasi penerus yang tidak lagi dapat memanfaatkannya;
- f) penganut paham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan "kebebasan" tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila.
- g) sistem politik demokratis, bertumpu pada kedaulatan rakyat ditopang budaya politik sehat, yaitu perilaku santun, mengedepankan perdamaian, anti kekerasan dalam berbagai bentuk, dan sifat sportif diharapkan mampu mengedepankan nasional yang demokratis, kuat, dan efektif
- h) pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diselaraskan kepentingan rakyat, diplomasi dilakukan adalah pro rakyat, *Diplomacy for the people*. Diplomasi harus dapat memberikan solusi, menjembatani perbedaan dan juga membuka peluang untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia. Secara mendetail, rencana politik luar negeri dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo, khususnya tiga pilar Trisakti, yaitu politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari dan budaya yang berkepribadian;
- i) fokus utama Politik dalam negeri adalah menjaga kedaulatan RI. Sedangkan untuk luar negeri menekankan pentingnya kerja sama *maritim*. Indonesia ingin mendorong terwujudnya poros maritim Nusantara melalui pendekatan kedaulatan, keamanan dan kemakmuran. Indonesia juga ingin mengedepankan doktrin poros maritim dalam pertemuan ASEAN, melalui *ASEAN Maritime Forum* dan mendorong terwujudnya konektivitas maritim dan memfasilitasi pembangunan jalur laut serta kerja sama dengan negara-negara kepulauan;
- j) komitmen Indonesia merespon agenda prioritas pertemuan ketiga G-20 *Development Working Group* (DWG) di Australia, antara lain : *Food Security And Nutrition, Financial Inclusion And Remittance* dan *Infrastructure* merupakan upaya merespon kebijakan pemerintah sejalan visi dan misi presiden, yaitu : politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari dan budaya yang berkepribadian. Pertemuan yang membahas finalisasi komitmen dan penyiapan rekomendasi terhadap

beberapa

beberapa agenda prioritas DWG, antara lain *Food Security And Nutrition, Financial Inclusion And Remittance* dan *Infrastructure* sesuai upaya pemerintah sekarang ini;

- k) kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, dengan menggulir dana Desa guna menunjang pembangunan di daerah, saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan di berbagai wilayah Indonesia;
- l) pelemahan rupiah juga dialami beberapa kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menunjang penguatan kurs rupiah hal ini disebabkan adanya penyebaran Covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk paruh pertama tahun 2020;
- m) penerapan kebijakan “ Omnibus Law” bidang investasi dan ketenagakerjaan yang akan menimbulkan berbagai persoalan terkait kedudukan omnibus law belum diatur serta berbenturan dengan daerah bahwa yang mengatur adalah daerahnya sendiri;
- n) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa, namun pada sisi lain dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa jika penegakkan hukum lemah;
- o) pembangunan bidang kesehatan masih dihadapkan pada permasalahan kenaikan iuran BPJS, disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang minim, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit menular seperti : virus Covid-19, demam berdarah (DBD), TBC, Flu Burung (AI), HIV/AIDS, Muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax dan lain-lain;
- p) terbatasnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan telah berdampak terjadinya pelanggaran batas teritorial kelautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan perbatasan dan masih lemahnya penegakan hukum, menjadi potensi meningkatnya gangguan terhadap sumber kekayaan laut dan habitatnya;
- q) sengketa Pertanahan yang dilator belakangi oleh status kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok yang tanpa disertai oleh dokumen kepemilikan. Disisi lain Penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan

Nasional, atau Pemerintah Daerah setempat menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal;

- r) permasalahan ketenagakerjaan masih diwarnai dengan tumbuh suburnya organisasi-organisasi buruh di Indonesia; maraknya tuntutan atas hak-hak dan kesejahteraan buruh; hubungan bipartit dan tripartit yang tidak harmonis; persaingan memperoleh lapangan pekerjaan dan maraknya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS ilegal;
- s) kejahatan siber atau kejahatan melalui jaringan Internet menjadi ancaman bagi stabilitas nasional, pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan tersebut yang dilakukan pelaku/sindiket dengan teknologi jaringan internet dan intranet, muncul beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs dan menyadap transmisi data orang lain. Sehingga kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil (perbuatan seseorang memasuki komputer orang lain tanpa ijin), dan delik materil (perbuatan menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain);
- t) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri.

4) Daerah

Perkembangan kehidupan Propinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu Trigatra (Geografis, Demografi dan sumber daya alam) dan aspek Astagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Agama dan Keamanan) sebagai berikut:

a) Geografis

Letak Geografis Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand mengakibatkan pesatnya arus keluar masuk pendatang yang berasal dari dalam dan luar negeri, disamping itu kondisi tersebut juga mengandung kerawanan terhadap keamanan negaradalam bentuk sengketa perbatasan dan kejahatan lintas negara serta beberapa kejahatan lainnya.



Wilayah

- (1) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada :
 - 5°,01° Lintang Utara s/d 0°,40°Lintang Selatan.
 - 103°,15° Bujur Timur s/d 109°,10° Bujur Timur.
- (2) Dengan Batas Wilayah antara lain :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau;
- (3) Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 425.214,69 Km² dengan luas wilayah daratan 8.201,72 Km² (2%), luas wilayah laut/Perairan 417.012,97 Km² (98%) yang meliputi 2.408 pulau besar dan kecil terdiri dari:
 - belum bernama sebanyak 1.058 pulau;
 - bernama sebanyak 1.350 pulau;
 - berpenghuni sebanyak 394 pulau (24%);
 - tidak berpenghuni sebanyak 1.654 pulau (76%);
 - pulau terluar sebanyak 22 pulau;
- (4) Curah hujan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2000 mm/th dengan kelembaban rata-rata berkisar antara 82-86 %, musim hujan terjadi pada bulan Oktober s/d April dan musim kemarau antara bulan April s/d Oktober, namun akibat pengaruh pemanasan global, sehingga mengalami pergeseran waktu yang tidak menentu;
- (5) Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi Baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau yang didirikan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Tanggal berdirinya adalah 1 Juli 2004 dengan ibu kotanya di Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 (dua) Kota dan 5 (lima) Kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
 - Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 64 (enam puluh empat) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 4.635,5 Km² (daratan 960,25 Km² dan 3.675,25 Km² lautan) dan jumlah penduduknya sekitar 1.376.009 jiwa. Letak Kota Batam yang

sangat

sangat strategis, berhadapan langsung berhadapan langsung dengan Singapura, sehingga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan telah ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ);

- Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 293,69 Km² (daratan 144,56 Km² dan 149,13 Km² lautan) dan jumlah penduduk sekitar 211.583 jiwa, Kota Tanjungpinang sempat menjadi ibukota Provinsi Riau yang pertama, namun sejalan dengan perkembangannya sesuai dengan SK Mendagri No.5 tanggal 21 Juni 2001 Kota Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonomi;
- Kabupaten Bintan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, meliputi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, 51 (lima puluh satu) Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 104.282,29 Km² (daratan 1.318,21 Km² dan 102.964,08 Km² lautan) dan jumlah penduduk sekitar 159.403 jiwa. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ), selain juga dikenal sebagai pusat pariwisata terpadu dan memiliki kawasan industri yang terus berkembang;
- Kabupaten Karimun dengan letak ibukotanya di Tanjungbalai Karimun, terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan dan 42 (empat puluh dua) Desa dengan luas wilayah sekitar 5.610,84 Km² (daratan 912,75 Km² dan 4.698,09 Km² lautan) dan jumlah penduduk sekitar 232.797 jiwa memiliki keunggulan tersendiri karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga merupakan salah satu basis pertumbuhan IMS – GT (Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Triangle) serta merupakan salah satu kawasan *Free Trade Zone* (FTZ);
- Kabupaten Lingga dengan ibukota Dabo Singkep terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 79 (tujuh puluh Sembilan) Desa/Kelurahan, luas wilayah sekitar 45.605,77 Km² (daratan 2.266,77 Km² dan 43.339,00 Km² lautan) dengan jumlah penduduk sekitar 89.781 jiwa, daerah Kabupaten Lingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan wisata bahari dan pertanian;

- Kabupaten Natuna letak ibukotanya di Ranai terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 218.122,46 Km² (daratan 2.009,04 Km² dan 216.113,42 Km² lautan) dan jumlah penduduk sekitar 77.771 jiwa, sedangkan luas lautan 97,72 Km², merupakan daerah yang kaya dengan minyak dan gas bumi;
- Kabupaten Anambas yang merupakan pemekaran dari Kab. Natuna letak ibu kotanya di Tarempa terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 54 (lima puluh empat) Desa/Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 46.664,14 Km² (daratan 590,14 Km² dan 46.074,00 Km² lautan) dan jumlah penduduk 42.309 jiwa.

b) Demografi

Jumlah Penduduk dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pendataan dari BPS dan Dinas Kependudukan Tahun 2019 sebanyak **2.189.653** jiwa dengan perincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH
1	Kota Batam	1.376.009
2	Kota Tanjung pinang	211.583
3	Kab. Karimun	232.797
4	Kab. Bintan	159.403
5	Kab. Lingga	89.781
6	Kab. Natuna	77.771
7	Kab. Anambas	42.309
	Jumlah	2.189.653

c) Sumber Daya Alam

(1) Minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Natunamerupakan salah satu andalan bagi pemasukan devisa negara dengan sistem bagi hasil yang saat ini dikelola oleh :

- PT. Conoco Philips;
- PT. Premier Oil Natuna;
- PT. Peralahan Arnebatara Natuna;
- PT. Star Energi Natuna.

- (2) Potensi sumber daya mineral dan energi relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir dan kuarsa. Manfaatnya selain sebagai sumber devisa negara juga rawan terhadap eksploitasi ilegal maupun pengelolaan yang kurang tepat akan berdampak pada kerusakan ekosistem.
- (3) Potensi kelautan sangat mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan. Di Kab Karimun terdapat budidaya ikan kakap, budidaya rumput laut dan kerambah jaring apung. Sedangkan di Kota Batam, Kab Bintan, Lingga dan Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan. Selain perikanan tangkap di keempat kota / kabupaten tersebut juga dikembangkan budidaya perikanan air laut dan air tawar. Di Pulau Setokok Batam terdapat pembenihan ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1 juta benih perTahunnya. Pelabuhan perikanan swasta Telaga Punggur Batam yang letaknya strategis karena berhadapan dengan jalur lintas kapal penangkapan ikan antara Kepri, ZEE, Laut Cina Selatan dan Singapura yang dapat meningkatkan ekspor hasil laut dan menambah PAD. Namun kondisi tersebut juga mengandung berbagai kerawanan, diantaranya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang dilengkapi dengan peralatan modern dan penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan bahan peledak;
- (4) Pertanian dan peternakan. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kab. Bintan, Karimun dan Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nanas serta cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau lainnya di Kepri sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit;
- (5) Provinsi Kepri merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Jumlah wisatawan tiap Tahunnya lebih dari satu juta orang. Obyek wisatanya antara lain wisata pantai yang terletak di berbagai Kota dan Kabupaten yaitu: Di Batam pantai melur, Pulau Abang dan pantai nongsa, Di Karimun pantai pelawan, Di Bintan pantai Lagoi, pantai tanjung berakit, pantai trikora dan Bintan Leisure Park. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti snorkeling. Selain wisata pantai dan bahari, Provinsi Kepri

juga memiliki objek wisata seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional serta event-event khas daerah. Di Tanjungpinang terdapat pulau penyengat yang terkenal bersejarah karena terdapat masjid bersejarah, makam-makam Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji yang kedua-duanya adalah pahlawan nasional. Lokasi wisata terkenal lainnya yaitu di Lagoi Bintan, luasnya 23.000 Ha dan kawasan industri terpadu di daerah Lobam, seluas 4.000 Ha, kawasan wisata tersebut dikembangkan dan dikelola dengan konsep profesional oleh pihak swasta dan baru dimanfaatkan sekitar 3.000 Ha, disamping itu untuk kawasan pengembangan sumber air ditetapkan di Teluk Bintan seluas 37.000 Ha;

- (6) Daerah Kota Batam dikenal sebagai kawasan pengembangan Industri, Perdagangan, Galangan Kapal dan Parawisata yang telah banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dikenal sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi dan merupakan salah satu kawasan *Free Trade Zone* (FTZ).

d) Idiologi:

- (1) Masyarakat Provinsi Kepri pada umumnya masih berpegang pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, belum ada indikasi kelompok/aliran yang mengarah pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila. Namun demikian masih adanya kelompok/suku terasing di beberapa wilayah perairan Kepri yang dinamakan suku laut karena tinggalnya diatas perahu yang terapung dilautan dan berada di pinggir-pinggir pulau wilayah Kepri yang kemungkinan besar belum memiliki pendidikan/pengetahuan yang cukup tentang Pancasila sebagai ideologi tunggal Bangsa Indonesia saat ini;
- (2) Suku laut tersebut bahkan dikenal menganut animisme atau mengkeramatkan suatu benda atau daerah dikarenakan pengaruh minimnya fasilitas pengetahuan tentang keagamaan dan sifat turun temurun yang sudah membudaya. Dengan demikian salah satu nilai pancasila yang mewajibkan setiap penduduk Indonesia untuk mempercayai adanya Tuhan YME masih belum terlaksana sepenuhnya. Namun setidaknya suku laut ini belum ada indikasi untuk melakukan upaya mendiskreditkan Pancasila ataupun membuat ideologi baru karena aktivitas utama hingga saat ini adalah melaut dan berburu di hutan;

- (3) Bergesernya nilai - nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan/kelompok kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan terkesan berkompetisi untuk menguasai beberapa titik/lokasi usaha tertentu dengan tujuan melakukan dominasi dalam hal “pengamanan” sehingga sering berimplikasi pada terjadinya konflik horisontal yang dampaknya dapat meluas karena mendompleng nama suku tertentu yang seakan - akan berlatarbelakang SARA.

e) Politik:

- (1) secara umum situasi politik di Kepri cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa kebijakan Pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif dan masih dapat diatasi dengan pendekatan/cara-cara yang baik dan produktif.
- (2) dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini perlu diperhatikan serius mengingat beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepri diketahui telah dikelola oleh investor asing seperti Pulau Bawah di Natuna, Pulau Penggalap dan Pulau Segayang di Kecamatan Galang Kota Batam. Kurangnya pengawasan terhadap beberapa pulau tersebut akan berdampak terjadinya penjarahan oleh pihak asing;
- (3) rencana pemekaran wilayah terhadap Kab Kep. Kundur, Kota Natuna, Kab. Natuna Selatan, Kab. Natuna Barat yang diusulkan Gubernur Kepri ke Mendagri dengan nomor surat: 130-/0188/set tanggal 26 Februari 2016;
- (4) adanya dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemko Batam, dimana sama-sama memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah Kota Batam. Kedua instansi tersebut berpegang kepada Peraturan Perundang-undangan masing-masing sehingga berdampak pada kepastian hukum dalam berinvestasi.

f) Ekonomi:

- (1) tumpangtindih dan duplikasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam yang dimana ada banyak aturan bahkan undang-undang tentang FTZ yang dinilai tidak efektif. Hal tersebut berdampak adanya wacana tentang pembubaran terhadap BP Batam;

- (2) adanya permasalahan tentang kampung tua yang dimana keberadaan Kampung Tua di Kota Batam sangat dipertahankan oleh masyarakat kota Batam terutama suku asli karena terdapat tapak perkampungan, situs purbakala, kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi, silsilah keluarga melayu yang menginginkan kepastian status dari BP Batam.
 - (3) penolakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang memberatkan warga masyarakat Kota Batam;
 - (4) perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti adanya moda transportasi berbasis online yang menimbulkan pengaruh positif maupun negative, untuk dampak positif mempermudah dan memberikan kenyamanan masyarakat, sedangkan dampak negative menimbulkan penolakan moda transportasi konvensional;
 - (5) Wilayah Provinsi Kepri bukan daerah penghasil kebutuhan konsumtif (sembako) sehingga untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kepri menggantungkan supply dari luar Kepri. Hal ini menimbulkan spekulasi/import ilegal/penyelundupan sembako ke wilayah Provinsi Kepri;
 - (6) Permasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme Kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam);
 - (7) Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Karimun yang disebabkan karena seringnya pemadaman listrik yang disebabkan mesin rusak (Over Haul) tidak sesuai dengan kapasitas daya yang didistribusikan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN.
- g) Sosial Budaya:
- (1) unjukrasa dan mogok kerja di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang disebabkan perselisihan industrial, dari perusahaan merasa sudah memberikan upah layak bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara mengingat mahal dan terbatasnya lahan di Batam dan adanya dualisme kewenangan antara Pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Pulau Batam. Disisi lain pihak buruh beranggapan

pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas kemudahan kepada pengusaha di Batam namun tidak memikirkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para buruh sedangkan dalam perumusan Upah Minimum Kota (UMK) hanya mencapai 60% dari KHL bagi kesejahteraan buruh;

- (2) permasalahan pendirian rumah ibadah dan aktivitasnya di wilayah Kota Batam dan Tanjungpinang yang disebabkan disamping permasalahan lahan tersendiri yang bermasalah kebanyakan masyarakat kurang sosialisasi dan pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah Ibadah;
- (3) permasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam);
- (4) pembangunan bidang kesehatan masih dihadapkan pada permasalahan kenaikan iuran BPJS, disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang minim, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit menular seperti : virus Covid-19, demam berdarah (DBD), TBC, Flu Burung (AI), HIV/AIDS, Muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax dan lain-lain

h) Keamanan:

- (1) Masih belum optimalnya pengamanan di wilayah perairan perbatasan dan pintu masuk melalui pelabuhan laut menjadikan Kepulauan Riau rawan terhadap kejahatan transnasional. Disamping perkembangan organisasi kejahatan internasional didukung kemajuan iptek, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan bersifat transnasional, seperti Narkotika dan terorisme sulit untuk ditangani;
- (2) Kejahatan beberapa kasus kriminalitas/kejadian umum yang bersifat konvensional dan menonjol yang masih akan terjadi pada Tahun 2021 diantaranya adalah: Curas yang dilakukan dengan modus pengancaman dengan senpi/sajam, penganiayaan, jambret dan modus lainnya yang dapat berkembang sesuai dengan situasi. TKP

jalanan sepi, perumahan, perkantoran, ruko, tempat hiburan. Curat yang dilakukan dengan modus pecah kaca mobil, memotong/merusak gembok pintu/pagar, congkel jendela/pintu, merusak atap dan sebagainya. TKP pemukiman, pertokoan, perkantoran, obyek vital, rukodan Curanmor yang umumnya dilakukan dengan modus merusak kunci stang dan merusak gembok. TKP parkir yang sepi, halaman rumah/ruko dan meningkatnya peredaran senjata api gelap serta Narkoba.

b. Analisa SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Bidhumas Polda Kepri dalam rangka melaksanakan fungsi kehumasan tersebut dapat dianalisa dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu :

1) Kekuatan (Strength)

- a) Personel Polri sebanyak 33 orang, terdiri dari 5 Pamen, 4 Pama, dan 24 orang Bintara.
- b) PNS Polri sebanyak 1 orang Pengatur (Golongan II);
- c) Organisasi Polda Kepri yang tersebar dari Mapolda sampai dengan Polsek dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai basis komunikasi antara Polri dan masyarakat melalui pers/media;
- d) Adanya kebijakan pimpinan untuk memaksimalkan peran Humas Polri sebagai juru bicara Polri atau penjurur dalam membangun opini publik yang positif terhadap kinerja Polri.
- e) Adanya semangat/motivasi yang dimiliki komuniti Humas Polri untuk mengabdikan diri pada tugas yang diembannya dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan sarjana walaupun tanpa dibiayai dinas.
- f) Tersedianya IT (Information Technology) di lingkungan Polri, meskipun masih terbatas.

2) Kelemahan (Weakness)

- a) kondisi personel Bidhumas Polda Kepri saat ini belum berdasarkan kompetensi;
- b) sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan komunikasi dan pengelolaan informasi, tugas-tugas Kehumasan tidak maksimal;
- c) pemahaman dan pemberdayaan fungsi Humas di jajaran organisasi Polri masih sangat minim, sehingga peran Humas belum dimanfaatkan secara maksimal.

- d) penempatan personel pada Bidhumas Polda Kepri maupun pengembalian fungsi Bidang Humas Polres/ta belum sesuai kompetensinya;
 - e) Perwira Penghubung Penerangan (Pabungpen) yang ditunjuk selama ini guna menyalurkan ketiadaan struktur Humas pada satker Polri bukan orang yang memiliki akses pada sumber informasi atau orang yang faham akan tugas kehumasan, sehingga tidak dapat berperan sebagai kontributor data internal Polri untuk keperluan pemberitaan.
 - f) Belum ada standar prosedur baku tentang mekanisme pelayanan informasi.
 - g) Kegiatan Kehumasan tidak terlepas dari perkembangan IT (Information Technology) yang semakin pesat, sedangkan personel Polri yang ditugaskan pada Humas Polri umumnya sangat awam IT (Information Technology).
 - h) Kecepatan dan kecanggihan berbagai media dalam menginformasikan berbagai hal tidak tercover dan bahkan tidak termonitor oleh personel Humas.
 - i) Kondisi alat/alsus kehumasan yang ada saat ini sangat terbatas, tidak sebanding dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat. Selain itu keberadaan Website Polri (Polri .go.id), sebagai pendukung kelancaran sistem informasi maupun penyebaran informasi belum dimanfaatkan secara optimal (mismanajemen).
 - j) File and Recording kegiatan operasional dan produk-produk administrasi masih lemah.
- 3) Peluang
- a) Kemajuan teknologi informasi dewasa ini membawa pengaruh kepada Personel Humas Polri sehingga cepat mengetahui berbagai informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi melalui media cetak maupun elektronik.
 - b) Media sebagai window on event and experiences. Masyarakat memandang media sebagai jendela dimana mereka bisa melihat sebagian dari apa yang sedang dilaksanakan oleh Polri, bahkan kini media sudah tampil vulgar/telanjang di ruang publik. Karena itu Polri harus lebih termotivasi untuk terus melakukan pembenahan meningkatkan kinerja.
 - c) Pada umumnya masyarakat memiliki hasrat yang tinggi untuk mengetahui kinerja Polri, baik dalam penanganan berbagai kriminalitas maupun dalam pelayanan masyarakat, sehingga wajar bila Polri menjadi primadona bagi kalangan pers/media.
 - d) Meningkatnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sarana teknologi dan informasi dalam berkomunikasi, seperti

dengan e-mail, website, twiter, instagram, facebook, mailist dan sms.

- e) Adanya program pelatihan dalam upaya meningkatkan keterampilan personel melalui kursus-kursus seperti cameramen/ fotografer baik di lembaga swasta maupun di lingkungan Polri (Pelatihan Public Speaking dan Cameramen) serta Pendidikan Spesialis Humas (Dikbangspes Humas selama 2 bulan).
 - f) Meningkatnya daya kritis masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara termasuk hak untuk memperoleh layanan informasi dari penyelenggara Negara (Polri).
- 4) Ancaman
- a) Pers/media memandang Polri sebagai Badan Publik yang besar dan memiliki kewenangan luas, sehingga diawasi/dikontrol masyarakat dan pers;
 - b) Kecenderungan terjadi pelanggaran etika Pers, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam kegiatan penyiaran/pemberitaan, karena cenderung didominasi motif kepentingan bisnis/politis ,sehingga mengabaikan makna “does it fit to shoot ?” dan “does it fit to print ?”.
 - c) Ketatnya persaingan “rating” antar media sehingga ada kecenderungan media tertentu ingin lebih eksklusif, lebih cepat, lebih unik dengan mengabaikan obyektifitas berita itu sendiri.
 - d) **Trial by The Press**. Pers masih sering menyajikan berita-berita yang sudah menjustifikasi seseorang sebagai tersalah sebelum mekanisme hukum menentukan kesalahan seseorang (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah).
 - e) Pemberitaan yang mencampur-adukan fakta dengan opini atau asumsi oleh kalangan pers media cetak maupun elektronik, memerlukan peningkatan hubungan kritis yang konstruktif dengan kalangan pers/media.
 - f) Netralitas wartawan. Adanya oknum pers yang mencari informasi atas pesanan orang/pihak tertentu yang berujung pada praktek manipulasi data/informasi (berita pesanan).
 - g) Pers/media memposisikan diri sebagai : wachtdog (bak anjing menggonggong ketika melihat penyimpangan), marketplaces of ideas (ruang penyampai ide/gagasan oleh siapa saja terutama bila ada permasalahan menyangkut kepentingan publik) dan sebagai the fourth estate (tetap dianggap berperan ketika fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dianggap tidak berfungsi lagi).
 - h) Cara kerja media sudah pada posisi proaktif dalam menentukan rencana pemberitaan mulai dari menentukan Agenda Setting, angel dan focus bidikan beritanya sehingga lebih mengarah News Making bukan News Finding. Karena itu Polri harus berkemampuan dalam Forcasting Analysis dan

Efective Antisipation, agar satuan-satuan lapangan tampil lebih efektif dan profesional khususnya dalam penanganan masalah/kasus-kasus yang menjadi sorotan pers/media.

- i) Prilaku kolusif. Masih ditemukan adanya oknum pers di lapangan mempraktekkan cara-cara memperoleh informasi secara tidak etis/tidak syah, seperti dengan cara menyuap oknum petugas.
- j) Dengan berlakunya UU No.14 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang bersiap melakukan/ melayani informasi yang diperlukan masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Bidhumas Polda Kepri, antara lain:

- a. Penempatan Personel yang tidak sesuai dengan Kompetensi pendidikan yang dimiliki.
- b. Belum tercukupinya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kehumasan.
- c. Masih lemahnya sistem pengendalian kinerja, sehingga masih ada personel yang tidak produktif dalam melaksanakan tugas.
- d. Belum konsistennya pola pendidikan dan penempatan personel sesuai dengan penggolongan termasuk jenjang kariernya.
- e. Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Bidhumas Polda Kepri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- f. Semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;

II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

- a. Visi dan Misi Polda Kepulauan Riau
 - 1) Visi Polda Kepulauan Riau
Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Aman dan Tertib.
 - 2) Misi Polda Kepulauan Riau
Melindungi, Melayani dan mengayomi masyarakat
- b. Visi dan Misi Bidhumas Polda Kepulauan Riau
 - 1) Visi Bidhumas Polda Kepulauan Riau
Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Aman dan Tertib.
 - 2) Misi Bidhumas Polda Kepulauan Riau
Melindungi, Melayani dan mengayomi masyarakat.

2. Tujuan

a. Tujuan Polda Kepulauan Riau

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Daerah Hukum Polda Kepulauan Riau;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polda Kepulauan Riau yang profesional;
- 4) Modernisasi Pelayanan Polda Kepulauan Riau;
- 5) Menerapkan Manajemen Polda Kepulauan Riau yang terintegrasi dan Terpercaya.

b. Tujuan Bidhumas Polda Kepulauan Riau

- 1) Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kepri dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
- 2) Terbangunnya kerjasama dengan masyarakat dalam wadah Pemolisian Masyarakat (Polmas).
- 3) Tergelarnya operasional Polri baik pre-emptif maupun preventif pada satuan –satuan kewilayahan.
- 4) Tertanggulangi trend perkembangan kejahatan, meningkatnya penuntasan kriminalitas terhadap 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu: Kejahatan Konvensional, Trans Nasional, Terhadap kekayaan negara dan yang Berimplikasi Kontijensi.
- 5) Terjaminnya roda pemerintahan dan roda demokrasi yang kondusif baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar tercipta sistem pemerintahan yang kredibel.
- 6) Terwujudnya keamanan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin kondusif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
- 7) Mampu mendorong dan menciptakan iklim usaha yang dipercaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonmi dalam negeri.

3. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polda Kepulauan Riau Tahun 2021

- 1) **Pertama** “memelihara dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial”;
- 2) **Kedua** “Meningkatkan kualitas Pelayanan publik Polda Kepri”;
- 3) **Ketiga** “Penegakan Hukum Polda Kepri yang Berkeadilan dan Terpercaya”;
- 4) **Keempat** “meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Kepri”;

- 5) **Kelima** “Peningkatan Almatsus Kepolisian yang modern di Polda Kepri”;
 - 6) **Keenam** ”Penataan Organisasi dan manajemen kerja Polda Kepri yang efektif dan efisien”;
 - 7) **Ketujuh** “Regulasi dan Sistem Pengawasan Polda Kepri yang efektif dan terpercaya”.
- b. Sasaran Prioritas Bidhumas Polda Kepulauan Riau Tahun 2021
- 1) Membuka ruang transparansi publik.
 - 2) Pengembangan kekuatan personel dalam rangka mengawaki Bidhumas Polda Kepri yang belum terpenuhi.
 - 3) Pengembangan kemampuan personel Bidhumas Polda Kepri melalui pendidikan dan pelatihan kehumasan.
 - 4) Pembangunan Materiil dan Fasilitas Bidhumas Polda Kepri.
 - 5) Pemberdayaan Perpolisian Masyarakat melalui kegiatan Kehumasan Bidhumas Polda Kepri
 - 6) Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dalam rangka pelaksanaan Grand Strategi Polri.
 - 7) Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat.
 - 8) Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi.
 - 9) Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelamatan masyarakat dan
 - 10) pemulihan keamanan.
 - 11) Melaksanakan program Reformasi Birokrasi Program Quick Wins.
 - 12) Meningkatkan kegiatan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan dukungan umum, antara lain mempublikasikan penegakan hukum di lingkungan Polri dan Pengawasan fungsional internal Polri, mempublikasikan penegakan tata tertib (Gaktib) terhadap pelanggaran didiplin bagi anggota Polri dan lain-lain.

III. Arah Kebijakan Strategi Polda Kepri dan Arah Kebijakan Strategi Bidhumas Polda Kepri Tahun 2021

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kepri Tahun 2021

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kepri Tahun 2021, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“memelihara dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial”**, yaitu:

- 1) peran intelijen keamanan Polda Kepri dalam menjaga Kamtibmas di Provinsi Kepri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Melaksanakan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polda Kepri yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi konflik, gangguan keamanan dan gejolak sosial.
(giat3111,3112,3114,3115,3116,3117,3119/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b) Mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data serta menyajikan informasi kepada pimpinan, satuan fungsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan instansi terkait.
(giat3111,3112,3114,3115,3116,3117,3119/prog4/SP1/SS1/IKU1).

- 2) Meningkatkan kegiatan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b) meningkatkan penyuluhan kontra radikal kepada ormas/komunitas perempuan, workshop pencegahan kejahatan, melanjutkan pelatihan tim sosialisasi kejahatan cyber;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- c) melakukan upaya pencegahan kejahatan melalui kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, pembinaan Kepolisian khusus, Pemolisian masyarakat serta pembinaan Bhabinkamtibmas
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- d) Bhabinkamtibmas menjadi motor penggerak pada setiap kegiatan masyarakat dan penyelesaian permasalahan di masyarakat.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKPU);
- e) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKPU);
- f) identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1).

- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kualitas pertemuan petugas Bhabinkamtibmas dengan komunitas yang ada di masyarakat.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b) memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat/pejabat publik dan para Bhabinkamtibmas yang berprestasi.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- c) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membina dan memberdayakan Pamswakarsa.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- d) mendorong pemanfaatan peralatan pengamanan seperti pemasangan CCTV di bangunan rumah, kantor dan di jalan untuk membantu pengamanan lingkungan.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- e) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat/mendukung organisasi radikal dan anti Pancasila.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- f) memberdayakan pengamanan swakarsa;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- g) meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mendampingi mantan pecandu Narkoba yang telah direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- h) peningkatan pemberdayaan pengembangan kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP
(giat5070/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- i) pembinaan eksistensi FKPM/pokdar kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP
(giat5070/prog4/SP1/SS1/IKU1).

- 4) Penanganan konflik secara humanis

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas Perempuan guna turut berpartisipasi

meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- b) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial. (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1).

5) Menggelar Polisi berseragam ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas”

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli di tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas serta melaksanakan bantuan SAR. (giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b) menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat. (giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- c) melaksanakan *Quick Respons* setiap permasalahan yang ada di masyarakat. (giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- d) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi kawasan tertentu (industri, pertambangan, perhubungan dan instalasi) pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta pengamanan *event* Daerah, Nasional maupun internasional. (giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- e) mengoptimalkan kekuatan cadangan (*stand by force*) pada kesatuan Brimob Polda Kepri untuk setiap saat siap digerakkan ke daerah rawan dengan sarana dan prasarana yang cepat baik melalui udara, laut maupun darat. (giat3147/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- f) memperkuat perlindungan anak dan wanita dengan memberdayakan Polwan melalui kegiatan Patroli engku putri. (giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- g) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis. (giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1).

6) Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) darat dan perairan/laut;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- b) penanganan kecelakaan lalu lintas.
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) melaksanakan kajian *black spot* dan *trouble spot* kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas.
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - d) membangun RTMC dan TMC.
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - e) membangun budaya tertib lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, kemitraan dan penegakan hukum.
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - f) melaksanakan patroli dan Binmas perairan serta sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (*life jacket*).
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - g) melaksanakan koordinasi dengan Dinas perhubungan, KPLP, BMKG, TNI AL dan Basarnasda Provinsi Kepri serta *stakeholder* lainnya untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan di perairan/laut.
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - h) Melaksanakan operasi DVI (*Disaster Victim of Identification*) dalam mengidentifikasi korban laka laut dan bencana alam yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepri dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- 7) Meningkatkan peran Polda Kepri dalam penanganan bencana untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Pembentukan Satgas penanganan bencana;
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) Peningkatan sinergitas dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka penanganan bencana;
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana; (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - d) menyiapkan personel Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan *stakeholder* dalam penanggulangan bencana;
(giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - e) memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada

masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1).

8) Terlaksananya pengamanan event nasional/internasional di daerah hukum Polda Kepri

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Melaksanakan mapping kerawanan dan ancaman potensi gangguan keamanan;
(giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1/);
- b) Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan penyelenggara event internasional;
(giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- c) Melaksanakan rapat internal dengan Polda yang akan menjadi tempat pelaksanaan event internasional;
(giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- d) Mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkontijensi;
(giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- e) Latihan dan peningkatan kemampuan personel Polri yang terlibat pengamanan;
(giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- f) Melaksanakan Anev pelaksanaan pengamanan event internasional;
(giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1).

9) Terwujudnya keamanan di wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan dalam wilayah hukum Polda Kepri.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan, Binmas perairan serta sambang nusa sampai pulau-pulau terluar berpenghuni.
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b) meningkatkan pengamanan di wilayah perairan Polda Kepri.
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- c) Melaksanakan penegakan hukum di perairan.
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- d) melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan pembinaan terhadap masyarakat di pulau-pulau terluar berpenghuni dan lokasi prioritas (Lokpri).
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/);

- e) meningkatkan pengamanan di PLBN untuk menjamin keamanan di titik perlintasan batas antara Indonesia dengan Negara tetangga pada Pos pemeriksaan lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS).
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - f) koordinasi dan kerjasama dengan Bakamla, Basarnas Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri dan Bea Cukai.
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- 10) penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polda Kepri dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergitas polisonal:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyiapkan personel Polda Kepri untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi.
(giat5052/prog4/SP7/SS1/IKU1);
 - b) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan daerah yang kondusif.
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- 11) peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan *stakeholder* lainnya;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan operasi Kepolisian.
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) melakukan evaluasi terhadap Kerjasama yang sudah ada.
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) mengoptimalkan Satgas penanggulangan bencana, konflik sosial dan terorisme.
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - d) menjalin kerjasama dengan pengelola Objek Vital dan objek tertentu lainnya/pihak swasta.
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- e) menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok/elemen masyarakat dalam upaya keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas.
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - f) menjalin kerjasama dengan *civil society* untuk merawat kebhinekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- 12) melaksanakan operasi kepolisian;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menggelar operasi Kepolisian mandiri kewilayahan dan operasi cipta kondisi untuk mewujudkan keamanan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang kondusif.
(giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Meningkatkan kualitas Pelayanan publik Polda Kepri**”, yaitu:
- 1) Pelayanan masyarakat dengan sistem yang berbasis Teknologi Informasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) evaluasi sistem pelayanan publik Polda Kepri yang berbasis Teknologi Informasi dan melaksanakan inovasi terhadap pelayanan publik.
(giat3133/prog4/SP2/ SS5/IKP11);
 - b) peningkatan kualitas pelayanan dibidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB) dengan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi.
(giat3133/prog4/SP2/ SS5/IKP11);
 - c) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Intelkam melalui SKCK dan Izin keramaian secara *online*.
(giat3111/prog4/SP2/ SS5/IKP11);
 - d) peningkatan kualitas pelayanan dibidang penegakan hukum melalui SP2HP dan publik komplain *online*.
(giat3136/prog5/SP2/ SS5/IKP11);
 - e) peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengaduan masyarakat secara *online*;
(giat5065/prog1/SP2/ SS5/IKP11);
 - f) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Binmas dengan penerbitan KTA dan ijazah Satpam dan SIO (Surat Ijin Operasional) BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan).
(giat5076/prog4/SP2/ SS5/IKP11);

- g) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Rekrutmen anggota Polri yang berbasis TIK.
(giat3107/prog3/SP2/ SS5/IKP11);
 - h) mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik, call centre 110, CCTV dan video conference melalui sarana command centre sebagai pusat komando dan kendali operasional Polda Kepri.
(giat3071/prog1/SP2/ SS5/IKP11);
 - i) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada personel Polda Kepri dan masyarakat umum;
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP11).
- 2) Profesional dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik.
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian *reward and punishment* secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan.
(giat5069/prog3/SP2/ SS5/IKP11);
 - b) melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik Polda Kepri khususnya pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dan pelayanan SKCK.
(giat3133/prog4/SP2/ SS5/IKP11);
 - c) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang pelayanan;
(giat3100/prog5/SP2/SS5/IKP11);
 - d) melaksanakan pelayanan surat izin operasional BUJP melalui pelayanan satu pintu di BKPM;
(giat5079/prog9/SP2/SS5/IKP11)
- 3) pengelolaan ruang RPK dan melanjutkan tata ruang SPKT yang humanis serta berbasis TIK;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA).
(giat5067/prog3/SP2/ SS5/IKP11);
 - b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.
(giat3142/prog5/SP2/ SS5/IKP11);

- c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada Reskrimum Polda, Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
(giat3142/prog5/SP2/ SS5/IKP11);
 - d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan.
(giat3142/prog2/SP2/ SS5/IKP11);
 - e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK.
(giat5060/prog2/SP2/ SS5/IKP11);
 - f) pengembangan SPKT berbasis TIK .
(giat5056/prog1/SP2/ SS5/IKP11).
- 4) melaksanakan *quick response* Kepolisian sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP):
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan tindak kejahatan.
(giat5052/prog4/SP7/ SS5/IKP11);
 - b) menyusun/revisi SOP tentang *quick respons* Kepolisian di daerah hukum Polda Kepri.
(giat5052/prog4/SP7/ SS5/IKP11).
- 5) Manajemen media
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemenuhan Alsus Multi media Bidhumas Polda Kepri.
(giat5056/prog1/SP2/ SS5/IKP11);
 - b) peningkatan kerjasama dengan media cetak elektronik dan *online*;
(giat5056/prog1/SP2/ SS5/IKP11);
 - c) peningkatan kegiatan multimedia melalui produk-produk multimedia;
(giat5056/prog1/SP2/ SS5/IKP11);
 - d) peningkatan kapasitas alsus pengelola informasi dan dokumentasi (PID).
(giat5056/prog1/SP2/ SS5/IKP11).

c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum Polda Kepri yang Berkeadilan dan Terpercaya”**, yaitu:

- 1) profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pemberantasan terhadap kejahatan dengan prioritas: tindak pidana korupsi, Narkoba dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kelompok marginal serta kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat;
(giat3136/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - b) pemberantasan terhadap kejahatan di wilayah perairan seperti *illegal fishing*, perdagangan orang, pertambangan liar di laut, perompakan di laut dan tindak pidana perairan lainnya;
(giat3136/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
 - c) peningkatan pengungkapan terhadap kejahatan tindak pidana umum, khusus dan Narkoba serta tindak pidana di perairan;
(giat3142,3143,3144,3145,3146/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
 - d) peningkatan koordinasi antar penyidik di daerah perairan Kepulauan Riau;
(giat3134/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
 - e) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol sesuai *Scientific Crime Investigation*;
(giat3136/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
 - f) melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana.
(giat3136/prog5/SP3/ SS2/IKU2).

- 2) Peningkatan kemampuan penyidik Polda Kepri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan penyidik secara bertahap untuk mewujudkan personil fungsi Reskrim yang handal;
(giat5069/prog3/SP3/ SS2/IKU2);
 - b) mengikutsertakan sertifikasi terhadap penyidik Polda Kepri;
(giat5069/prog3/SP3/ SS2/IKU2);
 - c) peningkatan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi Kedokteran Kepolisian dan pemenuhan kebutuhan visum;
(giat5069/prog3/SP3/ SS2/IKU2);
 - d) peningkatan kemampuan pemeriksa *forensic* dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*crime scene*)

investigation/CSI) guna membantu pengungkapan tindak pidana secara ilmiah.

(giat3136/prog3/SP3/ SS2/IKU2);

- 3) proses penyidikan yang efektif untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan;
(giat3088/prog1/SP3/ SS2/IKU2);
- b) peningkatan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
(giat5086/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
- c) membangun sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan).
(giat5086/prog5/SP3/ SS2/IKU2).

- 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal Polda Kepri yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antarsatker internal Polda Kepri.
(giat5084/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
- b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antarpenegak hukum;
(giat5084/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
- c) memperkuat pusat informasi kriminal daerah yang terintegrasi.
(giat5084/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
- d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP.
(giat5084/prog5/SP3/ SS2/IKU2).

- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Kepri”**, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polda kepri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengirim personel Polda Kepri untuk mengikuti Dikbangspes fungsi;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1);
- b) melaksanakan program latihan fungsi teknis Kepolisian;
(giat3100/prog3/SP4/ SS3/IKP1)

- c) pelatihan peningkatan kemampuan personil Polda Kepri tentang penguasaan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan;
(giat3100/prog3/SP4/ SS3/IKP1);
 - d) melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Polda Kepri;
(giat3100/prog3/SP4/ SS3/IKP1);
 - e) pelaksanaan program pelatihan revolusi mental.
(giat3100/prog3/SP4/ SS3/IKP1).
- 2) Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Dikbangum;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan kampanye penerimaan personel Polri (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara, Tamtama dan PNS Polri) secara *massive* untuk memperoleh calon personel Polri yang berkualitas;
(giat3107/prog3/SP4/ SS3/IKP1);
 - b) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polda Kepri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean*, prestasi dan inovasi dengan menggunakan aplikasi secara *online*;
(giat3107/prog3/SP4/ SS3/IKP1);
 - c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* dalam seleksi Dikbangum personel;
(giat3108/prog3/SP4/ SS3/IKP1);
 - d) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
(giat3105/prog3/SP47/ SS3/IKP1);
- 3) Pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel Polda Kepri secara *merryt system*;
(giat3108/prog3/SP4/ SS3/IKP1);
 - b) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* dalam pembinaan karir personel;
(giat3108/prog3/SP4/ SS3/IKP1);
 - c) menyelenggarakan klasifikasi dan *mapping* psikologi sebagai dasar spesialisasi.
(giat3110/prog3/SP4/ SS3/IKP1).

- 4) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi aparatur Polda Kepri:

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
(giat3105/prog3/SP47/SS3/IKP1)
- b) peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan secara paripurna kepada aparatur Polda Kepri dan masyarakat umum;
(giat3072/prog1/SP4/ SS3/IKP1);
- c) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi personel Polda Kepri.
(giat3072/prog1/SP4/ SS3/IKP1);
- d) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara Polda Kepri dengan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS).
(giat3072/prog1/SP4/ SS3/IKP1);
- e) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes.
(giat3072/prog1/SP4/ SS3/IKP1);
- f) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polda Kepri.
(giat3072/prog1/SP4/ SS3/IKP1).

- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Peningkatan sarana prasarana Polda Kepri”**, yaitu:

- 1) Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan Alat Materiiil Khusus (Almatsus) Polda Kepri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Polda Kepri yang ideal .
(giat5060/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- b) penyusunan standardisasi perlengkapan Polda Kepri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah sebagai wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan yang diselaraskan dengan tantangan tugas.
(giat5060/prog2/SP5/ SS4/IKP4);
- c) Pengusulan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polda Kepri modern berbasis teknologi informasi
(giat5060/prog2/SP5/ SS4/IKP4);

- d) mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada.
(giat5060/prog2/SP5/ SS4/IKP4).
- 2) Meningkatkan Sarana prasarana perairan dan perbatasan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan pemetaan terhadap kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Kepri sesuai karakteristik wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan.
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKP4);
- b) pemenuhan kebutuhan Alpalkam dan Almatsus perairan, Kepulauan dan perbatasan secara bertahap.
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKP4);
- c) mengusulkan pembangunan Polsek dan Polsubsektor serta pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar berpenghuni secara bertahap.
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP5);
- d) mengusulkan pembangunan Dermaga/pangkalan kapal pada Ditpolairud , Satpolair Polres serta Polsek/Polsubsektor.
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKP5);
- e) mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polda Kepri.
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKP4);
- f) Peningkatan dukungan anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP.
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKP4);
- g) Pemenuhan sarana prasarana Bhabinkamtibmas di wilayah perbatasan.
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKP4);
- h) pergelaran Alkom di Polres jajaran untuk mengcover jaringan komunikasi yang terintegrasi antara Polda dan Polres.
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKP5);
- i) Penguatan sistem *trengking* untuk kelancaran *traffic system* komunikasi radio.
(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKP5).
- 3) pengusulan pemenuhan rumah dinas aparatur Polda Kepri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah kepulauan dan perbatasan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengusulkan pemenuhan rumah dinas anggota Polda Kepri.
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKP5);
 - b) menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas, mess dan flat.
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKP5);
 - c) mempermudah personel Polda Kepri untuk mendapatkan Perumahan bekerja sama dengan ASABRI dan pihak pengembang/*developer*.
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKP5);
 - d) melakukan inventarisasi kondisi riil atas Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan.
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKP5);
 - e) Mengusulkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan.
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKP5);
 - f) menyusun Renbut Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan.
(giat5062/prog2/SP5/ SS4/IKP5).
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ***"Penataan Organisasi dan manajemen kerja Polda Kepri yang efektif dan efisien"***, yaitu:
- 1) Penguatan organisasi dan tatalaksana Polda Kepri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan analisa beban kerja (ABK) dan HTCK pada Satfung dan Satwil jajaran Polda Kepri.
(giat5052/prog1/SP5/SS5/IKP7);
 - b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja.
(giat5052/prog1/ SP5/SS5/IKP7);
 - c) mengusulkan peningkatan Tipologi Polres dan Polsek jajaran Polda Kepri.
(giat5052/prog1/ SP5/SS5/IKP7);
 - d) mengusulkan pembentukan Polsek dan Polsubsektor jajaran Polda Kepri.
(giat5052/prog1/ SP5/SS5/IKP7);
 - e) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan.
(giat5052/prog1/ SP5/SS5/IKP7);
 - 2) Peningkatan pelaksanaan *e-government* melalui *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement*.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Pelaksanaan aplikasi e-Sirena.
(giat5054/prog1/ SP5/SS5/IKP7);
 - b) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*.
(giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP7).
- 3) Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT disetiap satuan kerja.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan sistem teknologi informasi di satker jajaran Polda Kepri.
(giat5055/prog1/SP5/SS5/IKP7);
 - b) penambahan kapasitas *Bandwidth* untuk satker-satker Polda dan jajaran.
(giat5055/prog1/SP5/SS5/IKP7);
 - c) meningkatkan penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound* (SMART).
(giat5056/prog1/SP5/SS5/IKP7);
 - d) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja.
(giat5054/prog1/SP5/SS5/IKP7);
 - e) meningkatkan pengawasan SDM.
(giat3107/prog6/SP5/SS5/IKP7);
 - f) meningkatkan penerapan *reward and punishment* di satuan kerja.
(giat3105/prog6/SP5/SS5/IKP7).
- 4) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online*:

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian SMK *Online*.
(giat3108/prog3/SP5/SS5/IKP7);
 - b) meningkatkan prosentase pengisian SMK *online* sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel.
(giat3108/prog3/SP5/SS5/IKP7).
- 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penilaian dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polda Kepri secara bertahap dan berkelanjutan.
(giat5053/prog1/SP5/SS5/IKP10);
 - b) pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tingkat Polres dan satker jajaran Polda Kepri.
(giat5053/prog1/SP6/ SP5/SS5/IKP10);
 - c) pengukuran kinerja Polda Kepri dan Kewilyahan dengan Indeks Tata Kelola Polri.
(giat5053/prog1/SP6/ SP5/SS5/IKP10);
 - d) Pelaksanaan.monitoringdan evaluasi pelaporan *quick wins*.
(giat5053/prog1/SP6/ SP5/SS5/IKP10);
 - e) sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik.
(giat5053/prog1/SP5/SS5/IKP10);
 - f) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
(giat5053/prog1/SP5/SS5/IKP10);
 - g) kompetisi inovasi pelayanan publik.
(giat5053/prog1/SP5/SS5/IKP10).
- g. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Regulasi dan Sistem Pengawasan Polda Kepri yang Efektif dan terpercaya”**, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat.
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
 - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online (melalui Email)*.
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKP13);
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal.
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKP13);
 - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat kepada Polda Kepri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka.
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKP13);
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
(giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKP13).

- 2) pencegahan Korupsi di internal Polda Kepri;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri. (giat3088/prog1/SP6/ SS5/IKP13);
 - b) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Polda Kepri yang wajib melapor. (giat3088/prog1/SP6/ SS5/IKP13);
 - c) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat. (giat3090/prog1/SP6/ SS5/IKP13);
 - d) mengoptimalkan *whistle blower system* di lingkungan Polda Kepri. (giat3088/prog1/SP6/ SS5/IKP13);
 - e) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian. (giat3088/prog1/SP6/ SS5/IKP13).
- 3) pengawasan berbasis TI
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan; (giat3091/prog1/SP6/ SS5/IKP13);
 - b) penerapan sistem pengaduan masyarakat secara *online*. (giat3084/prog1/SP6/ SS5/IKP13)

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidhumas Polda Kepri Tahun 2021

Terwujudnya pembangunan opini masyarakat yang positif melalui membangun kemitraan, pembenahan dan pembangunan SDM, Sarpras, Sismed dan Anggaran dalam rangka pencapaian Renstra Polda Kepri 2019 – 2024.

Polda Kepri mengedepankan Bidhumas sebagai “ Front Office” berperan sebagai penjuror pencitraan mewujudkan system pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis ICT (Information and Communication Technology) yang tertata dalam system informasi terintegrasi (networking) dan terjalin dalam hubungan kemitraan sejajar serta menerima dan menyalurkan pengaduan, kritik, saran/masukan, dan aspirasi pengunjuk rasa dalam rangka pencitraan Polri.

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Ideal Bidhumas Polda Kepulauan Riau

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri;

1) Tujuan:

Terlaksananya dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja barang, belanja modal dan belanja lainnya.

2) Sasaran :

Tercapainya tatakelola administrasi tentang kinerja dan anggaran tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan Kenegaraan dan pemerintahan.

3) Kegiatan:

- a) Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.
- b) Penyelenggaraan operasional perkantoran.
- c) Perbaikan peralatan kantor/khusus.
- d) Bin/susun Proja dan Anggaran.
- e) Penyelenggaraan Kehumasan Polda Kepri

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

1) Tujuan:

Memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa sesuai pengembangan organisasi kehumasan Polda Kepri.;

2) Kegiatan:

- a) pengembangan Peralatan Bidhumas;
- b) dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras;
- c) perbaikan peralatan Bidhumas Polda Kepri.
- d) perawatan kendaraan khusus Bidhumas Polda Kepri.
- e) perawatan peralatan fungsi Bidhumas Polda Kepri

2. Pagu Indikatif Bidhumas Polda Kepulauan Riau Tahun anggaran 2021

Anggaran Pagu Indikatif Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4.613.169.000- dengan rincian komposisi anggaran sebagai berikut:

- a. Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Kepri T.A. 2021 per Jenis Belanja sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 2.410.496.000,-;
 - 2) Belanja Barang Rp. 2.202.673.000,-;
 - 3) Belanja Modal Rp. -
- b. Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - 1) Rupiah Murni Rp. 4.613.169.000,-
 - 2) PNBP Rp. -
- c. Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 per Program sebagai berikut:
 - 1) Dukungan Manajemen Rp. 4.467.342.000
 - 2) Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 145.827.000,-;

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.

Batam, 30 Juni 2020

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
KERPOLISIAAN DAERAH KEPULAUAN RIAU



HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

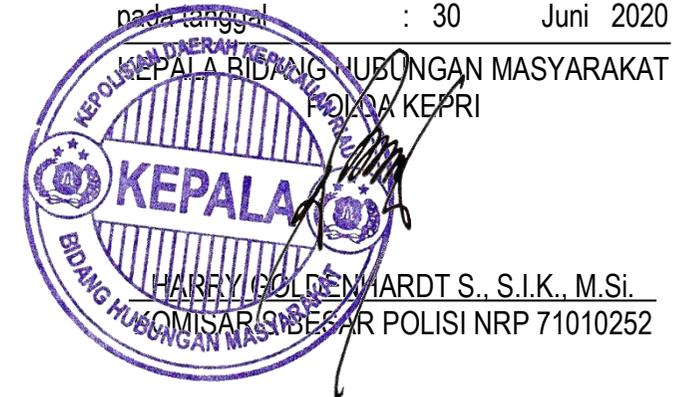
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KEPULAUAN RIAU
 BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
 BIDHUMAS POLDA KEPRI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya Postur Bidhumas Polda Kepulauan Riau yang efektif, profesional, bermoral, modern, dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran sarana dan prasarana.	Prosentase penambahan personel Bidhumas Polda Kepulauan Riau.	3
2	Terwujudnya peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.	a. Jumlah konferensi pers tentang kinerja Polda Kepulauan Riau dalam pengungkapan kasus kejahatan Konvensional dan Narkoba; b. Jumlah <i>Press Release</i> ke media Konvensional terkait kinerja Polda Kepulauan Riau; c. Jumlah dialog interaktif, sosialisasi dan <i>talkshow</i> melalui radio; d. Jumlah publikasi berita ke <i>website</i> Batamraya.com dan Tribatanews Polda Kepulauan Riau; e. Jumlah publikasi kegiatan, informasi, dan sosialisasi Polda Kepulauan Riau ke media sosial; f. Jumlah <i>counter opini</i> melalui media sosial; g. Jumlah dokumentasi dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepulauan Riau;	110 Giat 120 Giat 16 Giat 841 Giat 600 Giat 1496 Giat 385 Giat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		h. Kliping media <i>online</i> terkait pemberitaan Polda Kepulauan Riau.	1837 Giat

Ditetapkan di : Batam
pada tanggal : 30 Juni 2020



HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI

KODE	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PERKIRAAN TARGET			JENIS KEGIATAN	PRIORITAS (N/KL/B/0)	KEGIATAN/TARGET BARU	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3070	Penerangan Masyarakat	Menyelenggarakan peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri	a. Jumlah Konferensi pers tentang kinerja Polda Kepri dalam pengungkapan kasus kejahatan Konvensional dan Narkoba;	110	120	130	140				
			b. Jumlah Press Release ke media Konvensional terkait kinerja Polda Kepri;	357	389	422	430				
			c. Jumlah dialog Interaktif, sosialisasi dan Talkshow melalui Radio;	16	17	19	21				
			d. Jumlah publikasi berita ke Website Batamraya.com dan Tribratanews Polda Kepulauan Riau;	841	917	994	1000				
			e. Jumlah publikasi kegiatan, informasi, dan sosialisasi Polda Kepri ke Media sosial;	600	650	700	750				
			f. Jumlah Counter informasi melalui media sosial	1496	1632	1768	1800				
			g. Jumlah dokumentasi dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepri;	385	420	455	460				

KODE	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PERKIRAAN TARGET			JENIS KEGIATAN	PRIORITAS (N/KL/B/0)	KEGIATAN/TARGET BARU	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			h. Kliping Media Online terkait pemberitaan Polda Kepri	1837	2004	2171	2210				

Batam, 30 Juni 2020

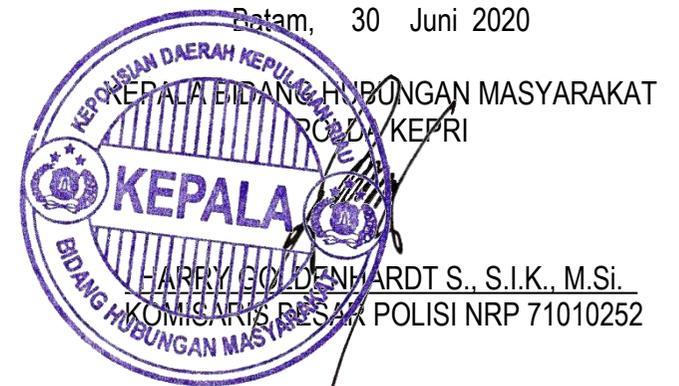


B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI

KODE	NAMA KEGIATAN	ALOKASI 2020	USULAN TAHUN 2021				PERKIRAAN KEBUTUHAN			LOKASI
			RUPIAH	PLN+PDN	PNBP+BLU	JUMLAH	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070	Penerangan Masyarakat	288.828.000	317.380.000	-	-	-	-	-	-	BIDHUMAS POLDA KEPRI
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	3.231.905.000	4.080.973.000	-	-	-	-	-	-	BIDHUMAS POLDA KEPRI
3149	Pengelolaan Multimedia	20.489.000	20.489.000	-	-	-	-	-	-	BIDHUMAS POLDA KEPRI
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	49.200.000	48.500.000	-	-	-	-	-	-	BIDHUMAS POLDA KEPRI
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	145.827.000	145.827.000	-	-	-	-	-	-	BIDHUMAS POLDA KEPRI
TOTAL		3.736.249.000	4.613.169.000	-	-	-	-	-	-	BIDHUMAS POLDA KEPRI

Batam, 30 Juni 2020



C. SUMBER PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI

NO	KODE KEGIATAN/ NPPHLN	KEGIATAN APBN / LOAN	PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI PHLN ATAU PINJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2019								Kebutuhan dana pendamping	
			SUMBER PHLN/ PDN	JENIS PHLN (P/H/KE)	PAGU(Sesuai MUA)	Penyerapan s/d Des 2018 (%)	Tanggal Mulai	Tanggal Tutup	Rencana penarikan			
									PLN + PDN	HIBAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3070	Penerangan Masyarakat	TIDAK ADA PHLN									
2	3073	Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri	TIDAK ADA PHLN									
3	5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	TIDAK ADA PHLN									
4	5059	Dukungan Manajemen dan teknik Sarpras	TIDAK ADA PHLN									
5	5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	TIDAK ADA PHLN									

Batam, 30 Juni 2020





SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin 821 /VI/REN.2.3./2020

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja TA. 2021 Satker Bidhumas Polda Kepri, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri);
 3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/114/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2021;
 4. DIPA RKA-KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019;
 5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/1/I/2020 tanggal 27 januari 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari agar melaksanakan tugas dalam penyusunan Rencana Kerja TA. 2021 Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau;
 2. melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kabidhumas Polda Kepulauan Riau;

SURAT PERINTAH KABIDHUMAS POLDA KEPRI
NOMOR : SPRIN/ 821 / VI /REN.2.3/2020
TANGGAL : 1 JUNI 2020

3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 2 s/d 30 Juni 2020

Selesai.

Dikeluarkan di : Batam
pada tanggal : Juni 2020



Tembusan :

1. Kapolda Kepri.
2. Wakapolda Kepri.
3. Irwasda Polda Kepri.
4. Karorena Polda Kepri.
5. Kabid Propam Polda Kepri.

DAFTAR ANGGOTA TIM POKJA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2020

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		KET
			STUKTURAL	PENUGASAN	
1.	HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KBP/71010252	KABIDHUMAS	PENANGUNG JAWAB	
2.	FERRI AFRIZON, SE	KOMPOL/76110885	KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS	KETUA	
3.	SYARIFUDDIN, SH	AKP/67040542	PAUR PENUM SUBBID PENMAS	WAKIL KETUA	
4.	WAGIYANTO	IPTU/68040310	PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN	SEKRETARIS	
5.	NORA LISTIAWATI, S.Ikom	IPDA/82080046	PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID	ANGGOTA	
6.	MEYKIE THELESSY	BRIPKA/80071172	PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	
7.	RAHMAT GUNAWAN	BRIPKA/85040265	BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED	ANGGOTA	
8.	ANDI SYAHPUTRA	BRIGADIR/85091407	BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS	ANGGOTA	
9.	ROSMALA SYAFITRI NASUTION	BRIGADIR/91050021	PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	
10.	REXI SHABRI	BRIPTU/92100009	BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED	ANGGOTA	
11.	CHANDRA SIANIPAR	PENGATUR I / 197306072014121001	PS. PAMIN V SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Batam
pada tanggal : 1

Juni 2020

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA KEPRI



HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 248 /VI/REN.2.3./2020/Bidhumas

Kepada : Yth. 1. Kasubbid PID Bidhumas Polda Kepulauan Riau
2. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepulauan Riau
3. Kasubbid Multimedia Bidhumas Polda Kepulauan Riau

Dari : Kabidhumas Polda Kepulauan Riau

Perihal : Undangan rapat pokja penyusunan Rencana Kerja Satker
Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2021

1. Rujukan:
 - a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri);
 - c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/14/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2021;
 - d. DIPA RKA-KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini diinformasikan kepada para Kasubbid. bahwa akan dilaksanakan rapat pokja penyusunan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020 pada :
 - a. hari / tanggal : Senin, 8 Juni 2020;
 - b. pukul : 10.00 wib s/d selesai;
 - c. tempat : Ruang Bidhumas Polda Kepulauan Riau;
 - d. acara : Rapat Pokja Penyusunan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2021
3. Demikian untuk menjadi periksa.

Batam, 3 Juni 2020

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA KEPRI


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

Tembusan:

1. Kapolda Kepri.
2. Wakapolda Kepri.
3. Irwasda Polda Kepri.

**NOTULEN RAPAT TIM POKJA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2021
PADA TANGGAL 8 JUNI 2020**

I. DASAR

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri);
- c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/114/III/2020 tanggal 19 maret 2020 tentang Rancangan Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2021;
- d. DIPA RKA - KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019;
- e. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/11/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Rancangan Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.

II. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Tim Pokja Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepri TA. 2020 dilaksanakan pada:

Hari : Senin;

Tanggal : 8 Juni 2020;

Pukul : 10.00 WIB s/d selesai;

Tempat : di Ruang Bidhumas Polda Kepulauan Riau;

III. PIMPINAN RAPAT: Kabidhumas Polda Kepri.

IV. PESERTA RAPAT

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		KET
			STUKTURAL	PENUGASAN	
1.	HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KBP/71010252	KABIDHUMAS	PENANGUNG JAWAB	
2.	FERRI AFRIZON, SE	KOMPOL/76110885	KASUBBAGREN MIN BIDHUMAS	KETUA	
3.	SYARIFUDDIN, SH	AKP/67040542	PAUR PENUM SUBBID PENMAS	WAKIL KETUA	
4.	WAGIYANTO	IPTU/68040310	PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN	SEKRETARIS	
5.	SURYA ISWANDAR, SH	AKBP/69020421	KASUBBID MULTIMEDIA	ANGGOTA	

			BIDHUMAS POLDA KEPRI		
6.	PRIYO PRAYITNO	AKBP/ 62110257	KASUBBIDPENM AS BIDHUMAS POLDA KEPRI	ANGGOTA	
7.	ROSMINI MANAN, SH	KOMPOL/ 64060083	KAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID BIDHUMAS POLDA KEPRI	ANGGOTA	
8.	NORA LISTIAWATI, S.Ikom	IPDA/82080046	PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID	ANGGOTA	
9.	MEYKIE THELESSY	BRIPKA/8007117 2	PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	
10.	RAHMAT GUNAWAN	BRIPKA/8504026 5	BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED	ANGGOTA	
11.	ANDI SYAHPUTRA	BRIGADIR/85091 407	BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS	ANGGOTA	
12.	ROSMALA SYAFITRI NASUTION	BRIGADIR/91050 021	PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	
13.	REXI SHABRI	BRIPTU/9210000 9	BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED	ANGGOTA	
14.	CHANDRA SIANIPAR	PENGATUR I / 19730607201412 1001	PS. PAMIN V SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	

V. HASIL

1. Seluruh perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Satker Bidhumas agar dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Bidhumas TA. 2021;
2. Dalam menentukan pencapaian target mengacu pada data tahun sebelumnya;
3. Alokasi Pagu Anggaran disesuaikan dengan usulan Pagu Ideal satker Bidhumas Polda Kepri TA. 2020.

VI. PENUTUP

Demikian notulen rapat Tim Pokja Penyusunan Rancangam Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2021 ini dibuat, sebagai bahan pengambilan kebijakan Pimpinan.

Batam, Juni 2020

SELAKU KETUA TIM POKJA
KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS POLDA KEPRI

FERRI APRIZON, SE
KOMISARIS POLISI NRP 65040060

DAFTAR ABSEN TIM POKJA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2021

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1.	HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KBP/71010252	KABIDHUMAS	
2.	FERRI AFRIZON, SE	KOMPOL/76110885	KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS	
3.	SYARIFUDDIN, SH	AKP/67040542	PAUR PENUM SUBBID PENMAS	
4.	WAGIYANTO	IPTU/68040310	PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN	
5.	SURYA ISWANDAR, SH	AKBP/ 69020421	KASUBBID MULTIMEDIA BIDHUMAS POLDA KEPRI	
6.	PRIYO PRAYITNO	AKBP/ 62110257	KASUBBIDPENMAS BIDHUMAS POLDA KEPRI	
7.	ROSMINI MANAN, SH	KOMPOL/ 64060083	KAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID BIDHUMAS POLDA KEPRI	
8.	NORA LISTIAWATI, S.lkom	IPDA/82080046	PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID	
9.	MEYKIE THELESSY	BRIPKA/80071172	PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN	
10.	RAHMAT GUNAWAN	BRIPKA/85040265	BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED	
11.	ANDI SYAHPUTRA	BRIGADIR/85091407	BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS	
12.	ROSMALA SYAFITRI NASUTION	BRIGADIR/91050021	PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN	
13.	REXI SHABRI	BRIPTU/92100009	BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED	
14.	CHANDRA SIANIPAR	PENGATUR I / 197306072014121001	PS. PAMIN V SUBBAG RENMIN	

Batam, Juni 2020
SELAKU KETUA TIM POKJA
KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS POLDA KEPRI

FERRI APRIZON, SE
KOMISARIS POLISI NRP 65040060

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

DOKUMENTASI RAPAT
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI T.A. 2021



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (536734) BIDHUMAS POLDA
ALOKASI Rp.4,613,169,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
060.01.BP 5059 5059.EAA	Program Modernisasi Alarmsus dan Sarana Prasarana Polri Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		145,827,000 145,827,000 145,827,000	
5059.EAA.994	Lokasi : KOTA BATAM Layanan Perkantoran	1.0		145,827,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			145,827,000	
AY	Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 4/6/10			120,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.137-Batam) - Ranmor Roda 4 operasional	4.0 UNIT	30,000,000	120,000,000	RM
BB	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2			4,500,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.137-Batam) - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	3.0 UNIT	1,500,000	4,500,000	RM
BH	Pemeliharaan peralatan Kantor			18,714,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.137-Batam) - Komputer/Laptop/Notbook - Printer - Inventaris Kantor - AC Split - Televisi	10.0 UNIT 8.0 UNIT 40.0 OT 4.0 OT 4.0 UNIT	730,000 690,000 80,000 610,000 63,600	7,300,000 5,520,000 3,200,000 2,440,000 254,000	RM
BI	Pemeliharaan peralatan Fungsional			2,613,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.137-Batam) - Camera Digital - Video Cam Recorder - Handycam - Handy Talky - Recorder	5.0 UNIT 1.0 UNIT 5.0 UNIT 10.0 UNIT 10.0 UNIT	98,748 250,000 108,632 100,000 32,700	493,000 250,000 543,000 1,000,000 327,000	RM
060.01.WA 3070 3070.EAI	Program Dukungan Manajemen Penerangan Masyarakat Layanan Kehumasan dan Protokoler	12.0 Layanan		4,467,342,000 317,380,000 317,380,000	
3070.EAI.001	Lokasi : KOTA BATAM Layanan Penerangan Masyarakat	12.0		317,380,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			317,380,000	
S	MENYELENGGARAKAN HUMAS			317,380,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.137-Batam) > PERS RELEASE HUMAS - Penggandaan Materi Siaran Pers atau Press Release [20 LBR x 50 EKS x 4 GIAT x 12 BLN] [20 LBR x 50 EKS x 4 GIAT x 12 BLN] - sneck [50 ORG x 4 GIAT x 12 BLN] [50 ORG x 4 GIAT x 12 BLN]	48000.0 EKS 2400.0 OH	250 15,000	12,000,000 36,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (536734) BIDHUMAS POLDA
 ALOKASI Rp.4,613,169,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Makan [50 ORG x 4 GIAT x 12 BLN] [50 ORG x 4 GIAT x 12 BLN]	2400.0 OH	41,000	98,400,000	
	> KEMITRAAN DENGAN WARTAWAN			0	
	- Penggandaan Materi [20 LBR x 40 EKS x 2 GIAT x 12 BLN] [20 LBR x 40 EKS x 2 GIAT x 12 BLN]	19200.0 EKS	250	4,800,000	
	- Sneak [40 ORG x 2 GIAT x 12 BLN] [40 ORG x 2 GIAT x 12 BLN]	960.0 OH	25,000	24,000,000	
	- Makan [40 ORG x 2 GIAT x 12 BLN] [40 ORG x 2 GIAT x 12 BLN]	960.0 OH	41,000	39,360,000	
	- Cetak Foto [40 LBR x 2 GIAT x 12 BLN] [40 LBR x 2 GIAT x 12 BLN]	960.0 LBR	5,000	4,800,000	
	> PERS RELEASE HUMAS			0	
	- Penggandaan Materi siaran Pers atau press release [20 LBR x 50 EKS x 1 GIAT x 12 BLN] [20 LBR x 50 EKS x 1 GIAT x 12 BLN]	12000.0 EKS	250	3,000,000	
	- Sneak [50 ORG x 1 GIAT x 12 BLN] [50 ORG x 1 GIAT x 12 BLN]	600.0 OH	25,000	15,000,000	
	- Makan [50 ORG x 1 GIAT x 12 BLN] [50 ORG x 1 GIAT x 12 BLN]	600.0 OH	41,000	24,600,000	
	- Cetak Foto [40 LBR x 1 GIAT x 12 BLN] [40 LBR x 1 GIAT x 12 BLN]	480.0 LBR	5,000	2,400,000	
	> MULTIMEDIA			0	
	- Patroli Siber	30.0 LAP	77,000	2,310,000	
	- Analisa Patroli Siber	30.0 LAP	108,000	3,240,000	
	- ATK	60.0 LAP	100,834	6,050,000	
	- Penggalangan Jaringan Cyber Troops dan netizen	40.0 LAP	100,000	4,000,000	
	> INFORMASI DAN EDUKASI MASYARAKAT			0	
	- Banner [2 BUAH x 10 GIAT] [2 BUAH x 10 GIAT]	20.0 BUAH	1,000,000	20,000,000	
	- Edukasi, himbauan via media cetak dan elektronik	3.0 GIAT	4,473,334	13,420,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.137-Batam)			4,000,000	RM
	> UANG HARIAN JALDIS DALAM KOTA (PERSONEL YANG MELAKSANAKAN PELIPUTAN)			0	
	- Uang Harian Jaldis Dalam Kota [2 ORG x 20 HARI] [2 ORG x 20 HARI]	40.0 OH	100,000	4,000,000	
3073	<u>Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri</u>			4,080,973,000	
3073.EAA	<u>Layanan Perkantoran</u>	1.0 Layanan		2,525,496,000	
3073.EAA.994	Lokasi : KOTA BATAM <u>Layanan Perkantoran</u>	1.0		2,525,496,000	
001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>			2,410,496,000	
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			2,410,496,000	
511161	<u>Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri</u> (KPPN.137-Batam)			44,402,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	1.0 THN	38,058,000	38,058,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,172,000	3,172,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,172,000	3,172,000	
511169	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri</u> (KPPN.137-Batam)			3,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	1.0 THN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (536734) BIDHUMAS POLDA
ALOKASI Rp.4,613,169,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511171	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri</u> (KPPN.137-Batam)			4,442,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	1.0 THN	3,806,000	3,806,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	318,000	318,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	318,000	318,000	
511172	<u>Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri</u> (KPPN.137-Batam)			1,777,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1.0 THN	1,523,000	1,523,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	127,000	127,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	127,000	127,000	
511176	<u>Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri</u> (KPPN.137-Batam)			2,171,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	1.0 THN	2,171,000	2,171,000	
511179	<u>Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri</u> (KPPN.137-Batam)			15,840,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	1.0 THN	15,840,000	15,840,000	
511193	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri</u> (KPPN.137-Batam)			2,520,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	1.0 THN	2,160,000	2,160,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	180,000	180,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	180,000	180,000	
511211	<u>Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			1,350,880,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	1.0 THN	1,157,896,000	1,157,896,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	96,492,000	96,492,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	96,492,000	96,492,000	
511219	<u>Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			26,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	1.0 THN	22,000	22,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511221	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			79,542,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	1.0 THN	68,178,000	68,178,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,682,000	5,682,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,682,000	5,682,000	
511222	<u>Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			15,977,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	1.0 THN	13,693,000	13,693,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,142,000	1,142,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,142,000	1,142,000	
511223	<u>Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			162,470,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (536734) BIDHUMAS POLDA
ALOKASI Rp.4,613,169,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511225	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	1.0 THN	139,260,000	139,260,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	11,605,000	11,605,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	11,605,000	11,605,000	
	<u>Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			16,892,000	
511226	- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	1.0 THN	14,478,000	14,478,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,207,000	1,207,000	
	- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,207,000	1,207,000	
	<u>Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			85,024,000	
511228	- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	1.0 THN	85,024,000	85,024,000	RM
511228	<u>Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			594,000,000	RM
511232	- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	1.0 THN	594,000,000	594,000,000	RM
511232	<u>Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI</u> (KPPN.137-Batam)			6,300,000	RM
511244	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	1.0 THN	5,400,000	5,400,000	RM
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	450,000	450,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	450,000	450,000	
	<u>Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri</u> (KPPN.137-Batam)			19,950,000	
512211	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	1.0 THN	17,100,000	17,100,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,425,000	1,425,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,425,000	1,425,000	
	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.137-Batam)			8,280,000	
002	- Belanja Lembur PNS Polri Gol-II [1 ORG x 2 JAM x 10 HARI x 12 BLN] [1 ORG x 2 JAM x 10 HARI x 12 BLN]	240.0 OJ	17,000	4,080,000	RM
	- Uang Makan Lembur PNS [1 ORG x 10 HARI x 12 BLN] [1 ORG x 10 HARI x 12 BLN]	120.0 OH	35,000	4,200,000	
				115,000,000	
<i>BW</i>	<i>PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR</i>			<i>115,000,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.137-Batam)			19,000,000	RM
	> BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN			0	
	>> BIDHUMAS		0	0	
521811	- Internet Speedy	12.0 BLN	1,200,000	14,400,000	RM
	- peralatan kantor	10.0 BLN	460,000	4,600,000	
				96,000,000	
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.137-Batam)				
	> BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI			0	
	- BIDHUMAS	1.0 THN	36,000,000	36,000,000	
	- Belanja Keperluan Sehari hari	1.0 THN	60,000,000	60,000,000	
3073.EAC	<u>Layanan Umum</u>	1.0 Layanan		1,555,477,000	
	Lokasi : KOTA BATAM				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (536734) BIDHUMAS POLDA
ALOKASI Rp.4,613,169,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3073.EAC.001	Layanan Dukungan Manajemen Internal Perkantoran	1.0		1,555,477,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			1,555,477,000	
<i>DY</i>	<i>KEGIATAN PEMBINAAN</i>			<i>10,560,000</i>	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.137-Batam)			10,560,000	RM
	- Transport dalam kota [1 ORG x 8 GIAT x 12 BLN] [1 ORG x 8 GIAT x 12 BLN]	96.0 OK	110,000	10,560,000	
<i>FS</i>	<i>DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER</i>			<i>130,000,000</i>	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.137-Batam)			130,000,000	RM
	> DUK OPSNAL BIDHUMAS			0	
	- Honor Pramubakti	24.0 BLN	2,000,000	48,000,000	
	- Tatap muka / Silaturahmi dengan Wartawan	1.0 GIAT	15,600,000	15,600,000	
	- Rapat Staff Bidhumas	12.0 GIAT	650,000	7,800,000	
	- Sosialisasi Perkap Ttg Kehumasan	1.0 GIAT	18,600,000	18,600,000	
	- Sosialisasi / Himbauan Tertib di ruang Publik	1.0 GIAT	8,000,000	8,000,000	
	- Pembinaan dan Asistensi PID Kewilayahan	5.0 GIAT	4,000,000	20,000,000	
	- Tambahan keperluan Perkantoran multimedia	4.0 GIAT	3,000,000	12,000,000	
<i>N</i>	<i>PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</i>			<i>28,080,000</i>	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.137-Batam)			28,080,000	RM
	- Penambah Daya Tahan Tubuh [9 ORG x 240 HR] [9 ORG x 240 HR]	2160.0 OH	13,000	28,080,000	
<i>S</i>	<i>MENYELENGGARAKAN HUMAS</i>			<i>1,386,837,000</i>	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.137-Batam)			1,383,837,000	RM
	> PENYELENGGARAAN HUMAS,PROTOKOL PEMBERITAAN (BIDHUMAS)			0	
	- Penerangan Masyarakat	60.0 GIAT	1,000,000	60,000,000	
	- Peliputan Berita	60.0 GIAT	1,000,000	60,000,000	
	- Biaya reproduksi	120.0 GIAT	587,559	70,507,000	
	- Pengadaan Barang	24.0 GIAT	1,000,000	24,000,000	
	- Pembinaan Wartawan	24.0 GIAT	250,000	6,000,000	
	- Cetak Majalah Seligi [4000 ORG x 4 TW] [4000 ORG x 4 TW]	16000.0 OK	19,812	316,992,000	
	> PENINGKATAN YAN INFO PUBLIK MELALUI PENYEBARAN/DISEMINASI INFORMASI			0	
	- Produksi Cetak Majalah Bulanan [4 GIAT x 2500 EKS] [4 GIAT x 2500 EKS]	10000.0 EKS	12,500	125,000,000	
	> PENYUSUNAN MAJALAH TINGKAT POLDA			0	
	>> HONOR KESEKRETARIATAN			0	
	- Penanggung Jawab [1 ORG x 4 GIAT] [1 ORG x 4 GIAT]	4.0 ORG	400,000	1,600,000	
	- Redaktur [1 ORG x 4 GIAT] [1 ORG x 4 GIAT]	4.0 ORG	300,000	1,200,000	
	- Editor [3 ORG x 4 GIAT] [3 ORG x 4 GIAT]	12.0 ORG	250,000	3,000,000	
	- Sekretariat [9 ORG x 12 BLN] [9 ORG x 12 BLN]	108.0 BLN	150,000	16,200,000	
	- Pembuat Artikel [60 HAL x 4 GIAT] [60 HAL x 4 GIAT]	240.0 HAL	100,000	24,000,000	
	- Fotografer [4 GIAT x 2 ORG] [4 GIAT x 2 ORG]	8.0 GIAT	180,000	1,440,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (536734) BIDHUMAS POLDA
ALOKASI Rp.4,613,169,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	>> PENDISTRIBUSIAN MAJALAH KE KEWILAYAHAN		0	0	
	- Polres Tanjungpinang	4.0 TW	250,000	1,000,000	
	- Polres Bintan	4.0 TW	250,000	1,000,000	
	- Polres Karimun	4.0 TW	500,000	2,000,000	
	- Polres Lingga	4.0 TW	900,000	3,600,000	
	- Polres Natuna	4.0 TW	1,500,000	6,000,000	
	- Polres Anambas	4.0 TW	1,600,000	6,400,000	
	> PRODUKSI FILM SEBAGAI BAHAN PUBLIKASI KINERJA POLRI DI MEDIA ONLINE INTERN DAN EKSTERN			0	
	- Pre-Pro Meeting [1 ORG x 1 GIAT x 1 BLN x 12 BLN] [1 ORG x 1 GIAT x 12 BLN]	12.0 GIAT	200,000	2,400,000	
	>> Production		0	0	
	- Sewa Peralatan / equipment [1 PKT x 1 GIAT x 12 BLN] [1 PKT x 1 GIAT x 12 BLN]	12.0 PKT	4,500,000	54,000,000	
	- Sutradara [1 ORG x 1 GIAT x 12 BLN] [1 ORG x 1 GIAT x 12 BLN]	12.0 ORG	300,000	3,600,000	
	- Penulis Naskah/Skenario [1 ORG x 1 GIAT x 12 BLN] [1 ORG x 1 GIAT x 12 BLN]	12.0 ORG	200,000	2,400,000	
	- Artis/Pemeran Objek Liputan [2 ORG x 1 GIAT x 12 BLN] [2 ORG x 1 GIAT x 12 BLN]	24.0 ORG	200,000	4,800,000	
	- Crew Peliput/Cameramen/lighting/audioman [3 ORG x 1 GIAT x 12 BLN] [3 ORG x 1 GIAT x 12 BLN]	36.0 ORG	150,000	5,400,000	
	>> Post Production		0	0	
	- Production/editing/Mastering [1 ORG x 1 GIAT x 12 BLN] [1 ORG x 1 GIAT x 12 BLN]	12.0 BLN	2,000,000	24,000,000	
	> HONORARIUM KONSULTAN / PAKAR / PROFESIONAL DAN DUTA POLRI			0	
	- Honorarium Jasa Narasumber/Pembahas dlm rangka Counter Opini tentang Kinerja Polri [4 ORG x 12 BLN] [4 ORG x 12 BLN]	48.0 OB	3,500,000	168,000,000	
	- Honorarium Jasa Narasumber / Pembahas Duta Polri sebagai ikon [2 ORG x 12 BLN] [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,500,000	84,000,000	
	>> PROMOSI MELALUI GOOGLE ADS 1000		0	0	
	IMPRESAN/BULAN DENGAN COST PER MILE				
	- PROMOSI MELALUI GOOGLE ADS 1000		5,000	60,000,000	
	IMPRESAN/BULAN DENGAN COST PER MILE [1000 IMPRESAN x 12 BLN] [1000 IMPRESAN x 12 BLN]	12000.0 IMPRE			
	> Pemasangan Jaringan dan Instalasi			0	
	- Layanan Langganan Internet Service Provider (ISP)	12.0 UNIT	3,179,000	38,148,000	
	> PENGELOLA WEBSITE POLDA			0	
	- Penanggung Jawab/ Redaktur	1.0 OB	400,000	400,000	
	- Editor	1.0 OB	350,000	350,000	
	- Penulis Artikel [3 ORG x 2 ARTIK x 2 ARTIKL x 260 HARI] [3 ORG x 2 ARTIKL x 260 HARI]	1560.0 ARTIKL	100,000	156,000,000	
	- Biaya Maintenance	1.0 THN	48,000,000	48,000,000	
	> SARANA KONTAK			0	
	- Sarana Kontak	12.0 BLN	200,000	2,400,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.137-Batam)			3,000,000	
	- Honor Pejabat/Panitia Pengadaan B/J [3 ORG x 1 PKT] [3 ORG x 1 PKT]	3.0 OP	600,000	1,800,000	
	- Honor Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan [3 ORG x 1 PKT] [3 ORG x 1 PKT]	3.0 OP	400,000	1,200,000	
3149	<u>Pengelolaan Multimedia</u>			20,489,000	
3149.EAC	<u>Layanan Umum</u>	1.0 Layanan		20,489,000	
	Lokasi : KOTA BATAM				RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (536734) BIDHUMAS POLDA
 ALOKASI Rp.4,613,169,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3149.EAC.001	Laporan Pengelolaan Multimedia	1.0		20,489,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			20,489,000	
S	MENYELENGGARAKAN HUMAS			20,489,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			20,489,000	RM
	(KPPN.137-Batam)				
	> PRODUK VIDEO INFORMASI EDUKASI MASYARAKAT (MULTIMEDIA)			0	
	- ATK [60 LBR x 6 GIAT] [60 LBR x 6 GIAT]	360.0 LBR	8,000	2,880,000	
	- Pulsa [4 ORG x 6 BLN] [4 ORG x 6 BLN]	24.0 OB	100,000	2,400,000	
	- Redaktur [2 ORG x 6 GIAT] [2 ORG x 6 GIAT]	12.0 OTER	400,000	4,800,000	
	- Editor [1 ORG x 6 BLN] [1 ORG x 6 BLN]	6.0 OTER	300,000	1,800,000	
	- Desain Grafis [1 ORG x 6 BLN] [1 ORG x 6 BLN]	6.0 OB	180,000	1,080,000	
	> PRODUK INFOGRAFIS EDUKASI MASYARAKAT (MULTIMEDIA)			0	
	- ATK [95 LBR x 6 GIAT] [95 LBR x 6 GIAT]	570.0 LBR	3,946	2,249,000	
	- Pulsa [3 ORG x 6 BLN] [3 ORG x 6 BLN]	18.0 OB	100,000	1,800,000	
	- Editor [1 ORG x 6 BLN] [1 ORG x 6 BLN]	6.0 OB	300,000	1,800,000	
	- Desain Grafis [1 ORG x 6 GIAT] [1 ORG x 6 GIAT]	6.0 OTER	180,000	1,080,000	
	- Pembuat artikel [1 ORG x 6 GIAT] [1 ORG x 6 GIAT]	6.0 OTER	100,000	600,000	
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi			48,500,000	
5056.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan		48,500,000	
	Lokasi : KOTA BATAM				
5056.EAJ.001	Layanan Informasi dan Dokumentasi	1.0		48,500,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			48,500,000	
Z	MENINGKATKAN PEMERATAAN INFORMASI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA			48,500,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			48,500,000	RM
	(KPPN.137-Batam)				
	- Promote Akun Resmi pada Platform Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	485.0 KNTN	100,000	48,500,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Batam, 26 Oktober 2020
 KABIDHUMAS POLDA KEPRI

HARRY GOLDENHARDT S.
 KOMBES POL NRP 71010252



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

1. Nama Kementerian / Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Nama Unit Organisasi : Bidhumas Polda Kepri
3. Misi Unit Organisasi : a) Meningkatkan pelayanan prima kesemua pihak baik internal maupun eksternal sesuai dengan SOP yang berlaku;
b) Memberikan pelayanan, pengamanan kepada pimpinan sesuai dengan protap yang ada agar pimpinan dapat bertugas dengan lancar, aman dan tanpa hambatan;
c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bidhumas melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pimpinan;
d) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
e) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Bidhumas Polda Kepri yang profesional dan akuntabel;
f) Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat sinergi polisional inter departemen dengan instansi terkait;
g) Menambah sarana dan prasarana penunjang guna meningkatkan kinerja anggota.
4. Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri
5. Kode Program : 060.01.01
6. Nama Program : Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Baru Lama

Pendanaan.....

Pendanaan	Alokasi Tahun 2020	Usulan Tahun 2021	Perkiraan Kebutuhan		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1. Rupiah	3.736.249.000	4.613.169.000	5.245.052.050	5.839.557.255	6.125.356.234
a. Pendamping					
b. NonPendamping					
2. PHLN atau PDN					
JUMLAH	3.736.249.000	4.613.169.000	5.245.052.050	5.839.557.255	6.125.356.234

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil / OutCome	Indikator kinerja utama
Mewujudkan peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah konferensi pers tentang kinerja Polda Kepulauan Riau dalam pengungkapan kasus kejahatan Konvensional dan Narkoba; b. Jumlah <i>Press Release</i> ke media Konvensional terkait kinerja Polda Kepulauan Riau; c. Jumlah dialog interaktif, sosialisasi dan <i>talkshow</i> melalui radio; d. Jumlah publikasi berita ke <i>website</i> Batamraya.com dan Tribatanews Polda Kepulauan Riau; e. Jumlah publikasi kegiatan, informasi, dan sosialisasi Polda Kepulauan Riau ke media sosial; f. Jumlah <i>counter opini</i> melalui media sosial; g. Jumlah dokumentasi dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepulauan Riau; h. Kliping media <i>online</i> terkait pemberitaan Polda Kepulauan Riau.